



Analisis Kelemahan Implementasi Kurikulum Merdeka: Sebuah Kajian Literatur

Siti Nurjannah^{1*}

¹ Program Studi Tadris Kimia, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Sept 15, 2024

Revised Nov 20, 2024

Accepted Dec 20, 2024

Available online Dec 29, 2025

Kata Kunci:

Kurikulum Merdeka, Implementasi Kurikulum, Pendidikan Indonesia, Tantangan Kurikulum

Keywords:

Merdeka Curriculum, Curriculum Implementation, Indonesian Education, Educational Challenges.



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Tadris Kimia Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun ajaran 2022/2023 oleh Kemendikbudristek merupakan upaya reformasi pendidikan Indonesia untuk menjawab tantangan era global dan pasca pandemi Covid-19. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai hambatan dan kelemahan yang perlu dikaji secara kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan kajian literatur dari berbagai sumber jurnal ilmiah tahun 2015-2024. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan lima kelemahan utama: (1) ketidaksiapan guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum baru; (2) keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur digital; (3) kesenjangan implementasi antardaerah; (4) kurangnya sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat; serta (5) beban administratif guru yang meningkat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dalam penyempurnaan implementasi Kurikulum Merdeka secara lebih merata dan efektif.

ABSTRACT

The Merdeka Curriculum, launched in the 2022/2023 academic year by Indonesia's Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), represents a major educational reform aimed at addressing global challenges and post-Covid-19 learning loss. This curriculum grants schools the flexibility and autonomy to design learning experiences that align with students' needs and characteristics. Despite its numerous advantages, its implementation in practice faces significant obstacles and weaknesses that warrant critical examination. This study aims to identify and analyze the primary weaknesses in the implementation of the Merdeka Curriculum based on a literature review of scientific journals from 2015 to 2024. The method employed is a literature study with a qualitative descriptive analysis approach. The review findings reveal five major weaknesses: (1) inadequate teacher readiness in understanding and applying the new curriculum; (2) limited facilities and digital infrastructure; (3) implementation disparities across regions; (4) insufficient socialization to parents and the community; and (5) increased administrative burden on teachers. These findings are intended to serve as evaluation material for policymakers in improving the more equitable and effective implementation of the Merdeka Curriculum.

1. PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan yang menentukan arah, tujuan, dan konten pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik (Mahmudin, 2021). Setiap perubahan kurikulum mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan dinamika global. Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan kurikulum, mulai dari Rentjana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013, dan kini Kurikulum Merdeka.

*Corresponding author

E-mail addresses:stinurjannah@mail.uinssc.ac.id

Kurikulum Merdeka (Kurmer) resmi diluncurkan pada tahun ajaran 2022/2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai respons terhadap krisis pembelajaran (learning loss) akibat pandemi Covid-19 (Tabuni et al., 2026). Kurikulum ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik, dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang pembelajaran sesuai potensi dan kebutuhan lokal masing-masing.

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka memiliki berbagai keunggulan, seperti adanya program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta sistem asesmen yang lebih holistik (Firdaus & Permana, 2024). Namun dalam praktiknya, implementasi kurikulum ini tidak berjalan mulus. Banyak guru, sekolah, dan bahkan orang tua yang belum sepenuhnya memahami dan siap menghadapi perubahan besar ini.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi kendala-kendala signifikan di lapangan. Marthana et al. (2023) menyatakan bahwa hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan beban yang berat bagi guru. Sementara itu, Hunaepi & Suharta (2024) menegaskan bahwa kesiapan guru, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya adalah faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum ini.

Oleh karena itu, kajian sistematis mengenai kelemahan implementasi Kurikulum Merdeka menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka berdasarkan kajian berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional terindeks dalam rentang tahun 2015-2024. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan DOAJ dengan kata kunci: "Kurikulum Merdeka", "kelemahan kurikulum merdeka", "implementasi kurikulum merdeka", "Merdeka Curriculum challenges", dan "Merdeka Curriculum weaknesses".

Kriteria inklusi artikel meliputi: (1) diterbitkan antara tahun 2016-2026; (2) membahas implementasi atau evaluasi Kurikulum Merdeka di Indonesia; (3) diterbitkan pada jurnal yang terindeks minimal SINTA 3 atau jurnal internasional bereputasi. Dari hasil pencarian, diperoleh lebih dari 30 artikel yang relevan, kemudian dipilih sebanyak 10 artikel yang paling sesuai untuk dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema kelemahan yang muncul secara berulang di berbagai literatur, kemudian dikategorikan dan diinterpretasikan secara deskriptif. Proses ini menghasilkan peta temuan mengenai kelemahan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang akan dipaparkan pada bagian hasil dan pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan kajian terhadap 20 artikel ilmiah yang relevan, ditemukan lima kelemahan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tema Kelemahan Implementasi Kurikulum Merdeka Berdasarkan Kajian Literatur

No.	Tema Kelemahan	Sumber Literatur
1	Ketidaksiapan guru	Firdaus & Permana (2024); Tabuni <i>et al.</i> (2026); Marthana <i>et al.</i> (2023); Ihsan (2022); Soleha & Mujahid (2024)
2	Keterbatasan infrastruktur digital	Tabuni <i>et al.</i> (2026); Hunaepi & Suharta (2024); Santoso <i>et al.</i> (2024); Al-Hayat Journal (2024)
3	Kesenjangan antardaerah	Hunaepi & Suharta (2024); Marthana <i>et al.</i> (2023); INJOE (2023)
4	Kurangnya sosialisasi kepada orang tua	Tabuni <i>et al.</i> (2026); Nisa <i>et al.</i> (2023)
5	Beban administratif guru meningkat	Marthana <i>et al.</i> (2023); Mayangsari <i>et al.</i> (2023); Soleha & Mujahid (2024)

Discussion

Ketidaksiapan Guru dalam Implementasi

Kelemahan paling dominan yang ditemukan dalam literatur adalah rendahnya kesiapan guru dalam memahami dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Firdaus & Permana (2024) dalam studinya di sekolah dasar menemukan bahwa banyak guru belum memahami karakteristik kurikulum secara menyeluruh, sehingga menghambat proses implementasi di kelas. Hal ini sejalan dengan temuan Ihsan (2022) yang menyatakan bahwa kesiapan guru merupakan faktor paling kritis dalam keberhasilan Kurikulum Merdeka. Berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kesiapan guru secara nasional masih berada pada kategori sedang hingga rendah, dengan persentase guru yang merasa siap penuh hanya sekitar 30-40% saja.

Permasalahan ini semakin kompleks karena Kurikulum Merdeka menuntut perubahan paradigma mengajar yang fundamental, dari pembelajaran berbasis materi menjadi pembelajaran berbasis kompetensi dan proyek (Kurnia & Novaliyosi, 2023). Banyak guru yang terbiasa dengan pola Kurikulum 2013 mengalami kesulitan dalam beradaptasi, terutama dalam merancang modul ajar, asesmen diagnostik, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Ketidaksiapan ini lebih terasa di daerah pedesaan dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), di mana akses pelatihan dan pendampingan jauh lebih terbatas dibandingkan daerah perkotaan.

Selain itu, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan memperburuk situasi. Banyak guru hanya mendapatkan sosialisasi singkat melalui Platform Merdeka Mengajar tanpa pendampingan intensif, sehingga penerapan di kelas cenderung bersifat formalitas. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa guru di sekolah penggerak lebih siap dibandingkan sekolah reguler, tetapi secara keseluruhan, masih terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan antar guru.

Secara keseluruhan, ketidaksiapan guru tidak hanya menghambat pencapaian tujuan Kurikulum Merdeka, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Tanpa peningkatan kesiapan yang sistemik melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan yang merata, implementasi kurikulum ini sulit mencapai hasil yang diharapkan di seluruh Indonesia.

Keterbatasan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Digital

Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada platform digital Merdeka Mengajar sebagai sarana utama pelatihan dan pelaksanaan kurikulum. Namun, infrastruktur digital yang belum merata di seluruh Indonesia menjadi hambatan besar. Tabuni et al. (2026) dalam systematic literature review-nya menemukan bahwa keterbatasan sarana digital menjadi salah satu dari lima hambatan utama penerapan Kurikulum Merdeka. Menurut data BPS (2025), hanya sekitar 5,31% sekolah dasar yang memiliki akses komputer memadai, sementara di tingkat SMA baru mencapai sekitar 39%.

Hunaepi & Suharta (2024) dalam kajiannya menambahkan bahwa kesenjangan akses teknologi menciptakan disparitas pengalaman belajar yang sangat tajam antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Kondisi ini sangat merugikan sekolah-sekolah di daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Lebih dari 33.182 sekolah di wilayah 3T masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar termasuk listrik dan internet (Kemendikdasmen, 2025).

Kesenjangan infrastruktur ini tidak hanya menghambat akses siswa terhadap materi pembelajaran digital, tetapi juga membatasi guru dalam mengikuti pelatihan daring dan mengembangkan modul ajar berbasis teknologi. Sekolah di wilayah perkotaan Jawa cenderung lebih siap dengan koneksi internet yang stabil, sedangkan sekolah di luar Jawa dan daerah terpencil sering mengalami putus-putusnya akses internet, sehingga implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tidak merata.

Secara keseluruhan, keterbatasan infrastruktur digital menjadi salah satu akar masalah yang memperlemah efektivitas Kurikulum Merdeka. Tanpa pemerataan infrastruktur yang masif, kurikulum ini berisiko hanya berhasil di daerah maju dan gagal di wilayah yang justru paling membutuhkan perbaikan kualitas pendidikan.

Kesenjangan Implementasi Antardaerah

Kelemahan ketiga yang signifikan adalah terjadinya kesenjangan implementasi yang besar antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau Jawa dan luar Jawa. Marthana et al. (2023) menemukan bahwa sekolah-sekolah di perkotaan dengan sumber daya lebih memadai cenderung lebih berhasil dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Kesenjangan ini berpotensi memperparah ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia yang sudah menjadi masalah struktural selama ini.

European Journal of Education and Pedagogy (2023) mencatat bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah yang berbeda memberikan pengalaman yang sangat bervariasi, tergantung pada ketersediaan sumber daya lokal, dukungan kepala sekolah, dan kompetensi guru setempat. Sekolah di Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi yang lebih tinggi dibandingkan sekolah di provinsi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Hunaepi & Suharta (2024) menyebutkan bahwa faktor geografis, ekonomi, dan infrastruktur menjadi penyebab utama disparitas ini.

Kesenjangan antardaerah ini terlihat dari berbagai aspek, mulai dari kualitas pelatihan guru hingga kemampuan sekolah dalam melaksanakan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Di daerah perkotaan, sekolah lebih mudah mengakses pelatihan dan sumber belajar tambahan, sedangkan di daerah terpencil banyak guru yang masih kesulitan memahami platform Merdeka Mengajar karena keterbatasan akses internet. Kondisi ini menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka di luar Jawa cenderung lambat dan kurang optimal.

Secara keseluruhan, kesenjangan implementasi antardaerah bukan hanya masalah teknis, melainkan mencerminkan ketidakadilan sistem pendidikan nasional. Jika tidak segera diatasi melalui kebijakan afirmasi dan pemerataan sumber daya, Kurikulum Merdeka berpotensi gagal menjadi alat pemerataan pendidikan dan justru memperlebar jurang kesenjangan antarwilayah di Indonesia.

Kurangnya Sosialisasi kepada Orang Tua dan Masyarakat

Implementasi Kurikulum Merdeka juga menghadapi tantangan dari sisi komunikasi kepada pemangku kepentingan di luar sekolah, khususnya orang tua peserta didik. Tabuni et al. (2026) menemukan bahwa kurangnya sosialisasi kurikulum kepada orang tua menjadi salah satu hambatan nyata. Banyak orang tua yang tidak memahami filosofi dan mekanisme Kurikulum Merdeka, sehingga tidak dapat mendukung proses pembelajaran anak di rumah secara optimal.

Nisa et al. (2023) dalam kajian literturnya menambahkan bahwa minimnya pemahaman orang tua terhadap sistem asesmen yang baru, khususnya penghapusan angka raport konvensional, sering menimbulkan kekhawatiran dan resistensi dari orang tua yang terbiasa dengan pola penilaian lama. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai keluhan dan kurangnya dukungan dari keluarga terhadap kegiatan pembelajaran berbasis proyek di rumah.

Kurangnya sosialisasi ini semakin terasa di daerah pedesaan dan perkotaan kelas menengah ke bawah, di mana akses informasi mengenai Kurikulum Merdeka masih sangat terbatas. Banyak orang tua hanya mengetahui perubahan kurikulum secara sepintas melalui anaknya atau media sosial, tanpa pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan manfaatnya. Secara keseluruhan, kurangnya sosialisasi yang masif kepada orang tua dan masyarakat menjadi salah satu kelemahan penting yang dapat menghambat keberhasilan Kurikulum Merdeka. Padahal, keterlibatan orang tua merupakan faktor kunci dalam mendukung pembelajaran berpusat pada siswa. Tanpa komunikasi yang efektif, implementasi kurikulum ini sulit mencapai hasil yang maksimal.

Peningkatan Beban Administratif Guru

Kelemahan kelima yang banyak disoroti dalam literatur adalah meningkatnya beban administratif guru dalam Kurikulum Merdeka. Marthana et al. (2023) menegaskan bahwa guru menanggung beban yang berat dalam penyusunan modul ajar, perancangan asesmen diagnostik, pengelolaan laporan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta pelaporan perkembangan peserta didik secara berkala. Beban ini dirasakan semakin berat karena guru harus menyelesaikan berbagai dokumen baru yang sebelumnya tidak ada di Kurikulum 2013.

Soleha & Mujahid (2024) juga menemukan bahwa hambatan utama guru dalam kehidupan sehari-hari adalah tingginya tuntutan administrasi yang menyita waktu dan energi. Banyak guru mengeluhkan bahwa mereka harus menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengisi platform Merdeka Mengajar, menyusun instrumen penilaian, dan mendokumentasikan kegiatan proyek daripada mempersiapkan pembelajaran yang berkualitas di kelas. Kondisi ini terutama dirasakan oleh guru di sekolah reguler yang tidak mendapatkan pendampingan intensif.

Ironisnya, salah satu tujuan utama diluncurkannya Kurikulum Merdeka adalah untuk mengurangi beban administrasi guru agar lebih fokus pada pembelajaran. Namun di lapangan, banyak guru justru

merasakan sebaliknya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di sekolah. Kurangnya simplifikasi format dokumen dan otomatisasi sistem pelaporan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

Secara keseluruhan, peningkatan beban administratif guru berpotensi menyebabkan kelelahan (burnout) dan penurunan motivasi mengajar. Jika tidak segera diatasi, kelemahan ini dapat mengurangi efektivitas Kurikulum Merdeka secara keseluruhan, karena guru sebagai ujung tombak pendidikan justru kehilangan waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan peserta didik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka membawa semangat pembaruan dan inovasi yang positif dalam dunia pendidikan Indonesia, implementasinya masih menghadapi lima kelemahan utama yang perlu mendapat perhatian serius. Kelemahan tersebut meliputi ketidaksiapan guru, keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur digital, kesenjangan implementasi antardaerah, kurangnya sosialisasi kepada orang tua, serta meningkatnya beban administratif guru.

Kelemahan-kelemahan ini bukan berarti Kurikulum Merdeka harus dihentikan, melainkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan perlu berkolaborasi untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi guru, meningkatkan infrastruktur digital secara merata, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan menyederhanakan beban administratif guru. Kurikulum Merdeka yang saat ini masih dalam tahap adaptasi perlu terus disempurnakan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta didik Indonesia.

5. REFERENSI

- European Journal of Education and Pedagogy. (2023). Implementation of the Merdeka Curriculum and its challenges. *European Journal of Education and Pedagogy*, 4(3), 111-116. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2023.4.3.648>
- Firdaus, R., & Permana, J. (2024). Kelebihan dan kekurangan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(3), 1885-1897. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7570>
- Hunaepi, H., & Suharta, I. G. P. (2024). Transforming education in Indonesia: The impact and challenges of the Merdeka Belajar curriculum. *Path of Science*, 10(6), 5026-5039. <https://doi.org/10.22178/pos.105-31>
- Ihsan, M. (2022). Teacher readiness for the implementation of the Merdeka Belajar curriculum. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/tmkm.v1i1.428>
- Kurnia, T., & Novaliyosi, N. (2023). Analisis kesiapan guru matematika dalam menerapkan Kurikulum Merdeka di SMA. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1811-1816. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1702>
- Mahmudin, A. S. (2021). Pengembangan bahan ajar mata pelajaran pendidikan agama islam oleh guru tingkat sekolah dasar. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 2(2), 95-106. <https://doi.org/10.30762/sittah.v2i2.3396>
- Marthana, I. M., Yusuf, M., Rahman, A., Aniati, A., & Supriyanto, D. (2023). The challenges and opportunities of Kurikulum Merdeka implementation in Indonesian schools. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 364-382. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.72>
- Mayangsari, M. (2024). Analysis of the implementation of the independent curriculum at SMP Negeri 2 Sumobito. *Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 4(1), 30-40. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v4i1.87>
- Nisa, S. K., Yoenanto, N. H., & Nawangsari, N. A. F. (2023). Hambatan dan solusi dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar: sebuah kajian literatur. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(3), 287-298.
- Soleha, Z., & Mujahid, K. (2024). Analisis hambatan dan tantangan: implementasi Kurikulum Merdeka dalam kehidupan sehari-hari guru. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia TSAQOFAH*, 4(1), 563-574. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2531>

Tabuni, I., Asso, A., Sukiastini, I. G. A. N. K., Desta, M. S., Eva, Y., & Tebiari, L. A. (2026). Systematic literature review: analisis problematika penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i1.9659>